



Duta Besar Disuguhi Gatot Tiwul

● Pemkot Yogya Berhemat Anggaran Konsumsi
 ● Surat Edaran Menteri PAN-RB Sudah Diterapkan

IN DEPTH NEWS

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah diwajibkan melaksanakan penghematan anggaran. Di antaranya mengurangi rapat di hotel dan wajib menyajikan menu makanan tradisional, panganan lokal pada saat rapat.

Selain menghemat anggaran, penyajian makanan dan buah-buahan lokal dimaksudkan untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan kedaulatan pangan nasional. Menindaklanjuti SE tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mengaku tak kesulitan. Sebab, sebelum SE dikeluarkan pada 3 November 2014 lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sudah menerapkan aturan untuk menghadirkan menu tradisional saat rapat.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan Pemkot Yogyakarta selalu menyuguhkan aneka makanan tradisional dalam berbagai pertemuan hingga rapat-rapat yang digelar di lingkungan Pemkot.

"Sudah sejak tiga tahun lalu, kami sudah melakukan itu. Kalau kami ada rapat-rapat, selalu sajikan makanan tradisional seperti jajanan pasar dan kue khas Yogya," ujar Haryadi, Jumat (5/12) di Balai Kota.

Menurut Haryadi, Pemkot juga sudah membuat surat edaran kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga tingkat kecamatan dan kelurahan terkait penyajian menu tradisional saat rapat. "Saat ini memang sedang ramai, tapi yang jelas kami sudah melakukan itu dari dulu," kata Haryadi.

Naik Kelas
Seluruh menu yang disajikan dalam rapat, kata dia,

■ Bersambung ke Hal 14



TRADISIONAL - Jajanan tradisional yang disuguhkan kepada Duta Besar Swiss untuk Indonesia Yvonne Baumman saat mengunjungi kantor Pemerintah Kota Yogyakarta, Jumat (5/12).

g. Protokol Netral Biasa
 Positif
 @/Biaya @/Unsur dikurangi

Duta Besar

Sambungan Hal 13

merupakan makanan lokal. Menurutnya, makanan tradisional itu memiliki nilai gizi yang tinggi. Semisal ubi dan singkong. "Harapannya makanan itu nantinya bisa naik kelas, karena semakin banyak yang menyajikannya," ujar Haryadi.

Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Emiliana Yulianti menjelaskan imbauan penyajian ubi, singkong dan makanan tradisional di lingkungan instansi pemerintahan sesuai edaran MenPAN-RB dalam rapat sudah diterapkan. Emilia mencontohkan, saat kunjungan duta besar Swiss untuk Indonesia ke kantor Balai Kota, Jumat (5/12) kemarin, sajian yang dihidangkan juga berupa makanan tradisional.

"Contoh, saat kunjungan Dubes Swiss juga sajiannya berupa gatot tiwul, *cenil*, dan juga ketan putih yang dimakan dengan kue

lopis, itu semua hidangan khas Yogya," ujar Emilia kepada *Tribun Jogja*.

Menurutnya, sajian yang diberikan kepada tamu memang tidak monoton harus ubi dan singkong, melainkan bisa hasil olahannya. Terutama untuk tamu-tamu penting wali kota seperti duta besar jajan yang disajikan memang harus sedikit 'berkelas'. Namun bukan berarti ubi dan singkong tidak bisa disajikan. Makanan berbahan tersebut dikemas penyajiannya.

"Penyajian makanan tradisional ini sudah lama kami lakukan, ini juga sekaligus untuk promosi. Buktinya, Dubes Swiss juga suka makan gatot tiwul," ujar Emil sapaannya.

Emil menjelaskan bukan hanya untuk tamu-tamu wali kota saja yang diberi hidangan menu tradisional. Pada rapat di lingkungan Pemkot, juga disugahi ma-

kana tradisional berbahan baku dari singkong. Sering juga saat rapat dengan dinas-dinas terkait hanya suguhan teh panas dan makanan tradisional ditata di atas tampah yang sudah dilapisi daun pisang.

"Isinya juga beragam makanan khas Jawa ada ubi, tiwul, ketan putih, gatot, getuk dan *cenil* yang dipadukan dengan parutan kelapa dan diberi taburan gula halus," ujarnya.

Menurutnya, untuk sajian makanan ringan tamu-tamu wali kota beberapa kali pernah memesan dari usaha kecil menengah (UKM) makanan tradisional di daerah Umbulharjo. Beberapa kali juga memesaninya dari di toko jajanan pasar, tergantung dari berapa banyak yang dibutuhkan.

Tak Mahal

Harga *snack* untuk tamu-tamu wali kota itu biasanya juga tidak terlalu mahal.

Khusus tamu-tamu penting biasanya dijatah Rp15 ribu. Sementara untuk *snack* rapat di SKPD anggaran *snack* sekitar Rp7.000.

"Tapi yang terpenting harus ada standarnya, kami punya tim untuk *test food* menu khusus untuk tamu wali kota," ujarnya.

Menuru Emil, makanan yang lolos *test food* itu biasanya masuk kategori rasanya enak, dari sisi kemasan menarik dan pastinya harus higienis. "Harus selektif karena di Yogya sekarang sudah banyak yang menyediakan makanan tradisional," tuturnya.

Sementara untuk menu rapat di tingkat SKPD, lanjut Emil, juga sudah diterapkan. Seperti ubi, pisang rebus, kacang rebus, jagung rebus dan gorengan. "Rasanya tidak ada yang kebetaran dengan menu itu, semua SKPD juga sudah mulai melakukannya," ujar Emil. (tea)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Umum dan Protokol	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005